

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMUKAN SAPI DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETERNAK SAPI (STUDI PADA
KELOMPOK TANI MAKMUR DESA KARANG ENDAH)**

(Skripsi)

oleh

RIA SHELAWATI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF CATTLE FATTENING PROGRAM AS EFFORTS TO INCREASE WELFARE OF CATTLE FARMERS (STUDY AT TANI MAKMUR GROUP IN KARANG ENDAH VILLAGE)

By

RIA SHELAWATI

Indonesia is an agricultural country, mostly subsistence as farmers. Eventhough farmers is the largest occopants but they remain at the lowest level refer to welfare values. The farmers themselves consist of farmers on fields, paddy field and cattle. In order to help the welfare of livestock farmers, the government has developed a program for them especially for cow's farmers which named fattening program. Fattening program is a government program through the Department of cattle by providing food aid and development support for cattle farmers in the region by forming groups of cattle farms. The program aims at cultivation and fattening in order to empower rural communities based on local resources.

This study is aim to describe the implementation of the fattening cattle program at Tani Makmur Group in Karang Endah Village as an effort to to improve the welfare farmers and to analyze all obstacles in the implementation of this program . The type of this research is descriptive type with qualitative approach. Then, the techniques of data collection was done by interviews, documentations and observations.

Results from the study show that cattle fattening program in Tani Makmur Group Karang Endah Village has been running well, but not maximum. Because the resources indicator which are human resources and non-human resources are still inadequate. Since the supplies facilities are lack as well as the lack of human resources special in technician equipment repair work, and also lack of competence farmers in processing feed. For that department for husbandry and animal health of Lampung province should provide special technicians and improve the quality of human resources with provide guidance and training to the cattle farmers as supporting the succed of the program .

Keywords :Cattle Fattening Program , Public Policy Implementation.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGGEMUKAN SAPI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETERNAK SAPI (STUDI PADA KELOMPOK TANI MAKMUR DI DESA KARANG ENDAH)

Oleh

RIA SHELAWATI

Indonesia merupakan negara agraris, sebagian bermatapencarian sebagai petani. Akan tetapi petani justru sebagai penghuni terbesar berada di tingkat terbawah nilai kesejahteraannya. Petani sendiri terdiri dari petani ladang, sawah dan peternak. Demi membantu kesejahteraan petani ternak, untuk itu pemerintah membuat program yaitu program penggemukan sapi. Dimana program penggemukan sapi merupakan suatu program pemerintah melalui Dinas Peternakan memberikan bantuan pakan dan melakukan pembinaan kepada peternak sapi di suatu daerah dengan membentuk kelompok-kelompok peternakan sapi. Program ini diarahkan pada pembudidayaan dan penggemukan sapi dalam rangka pemberdayaan masyarakat pedesaan yang berbasis sumber daya lokal.

Penelitian ini bertujuan menggambarkan pelaksanaan Program Penggemukan sapi di kelompok tani makmur Desa Karang Endah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan peternak serta mengetahui apasaja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program ini. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program penggemukan sapi di Kelompok Tani Makmur Desa Karang Endah sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum maksimal. Sebab pada indikator sumberdaya, sumber daya manusia dan non manusianya masih kurang karena persediaan fasilitas yang kurang memadai dan juga kurangnya SDM khusus dibidang teknisi perbaikan alat kerja, serta minimnya kompetensi peternak dalam mengolah pakan olahan. Untuk itu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung sebaiknya menyediakan ahli teknisi khusus dan lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan memberikan pembinaan dan pelatihan kepada peternak sapi sebagai penunjang keberhasilan program.

Kata Kunci: Program Penggemukan Sapi , Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Program Penggemukan Sapi Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Sapi (Studi Pada Kelompok Tani Makmur di Desa Karang Endah)

Oleh

RIA SHELAWATI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

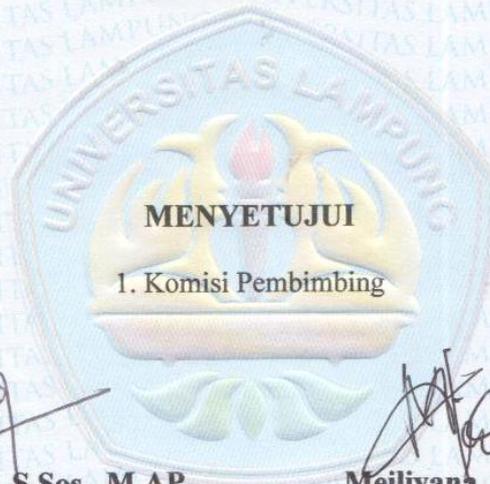
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMUKAN SAPI
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
PETERNAK SAPI**
(Studi pada Kelompok Tani Makmur di Desa Karang Endah)

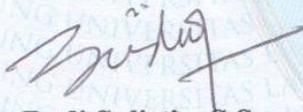
Nama Mahasiswa : **Ria Shelawati**

No. Pokok Mahasiswa : 1216041089

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.
NIP 19780923 200312 1 001


Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP 19740520 200112 2 002

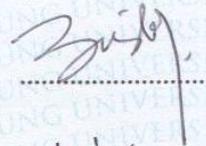
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002

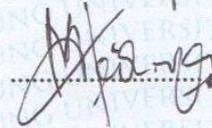
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**



Sekretaris : **Meiliyana, S.IP., M.A.**



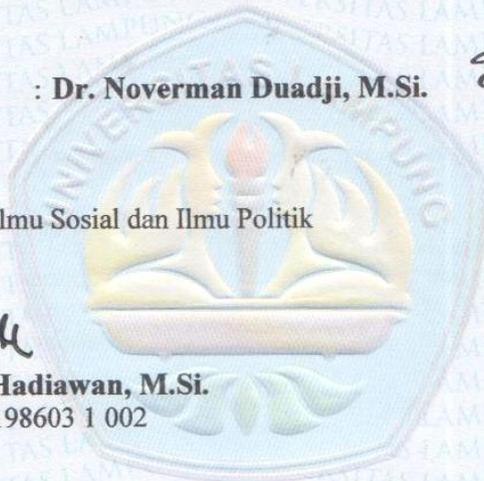
Penguji Utama : **Dr. Noverman Duadji, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP. 19580109 198603 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 September 2016**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 22 September 2016

Yang membuat pernyataan,



Ria Shelawati

NPM. 1216041089

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ria Shelawati, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 31 Maret 1994. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sukidi, S.Sos dan Ibu Sunting Mas, S.IP

Pendidikan formal yang telah ditempuh yakni pendidikan Taman Kanak-kanak Aisyiyah 1 diselesaikan pada tahun 2000. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Labuhan Ratu diselesaikan tahun 2006. Pendidikan selanjutnya yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009 dan selama itu penulis mengikuti Pramuka. Kemudian penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Lampung diselesaikan tahun 2012 dan mengikuti Organisasi Paskibra.

Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN Tertulis dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) pada periode 2014/2015. Pada tahun 2015 di pertengahan bulan Januari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa karya murni, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang selama 40 hari.

MOTTO

Administrasi tertib, Pelayanan baik
(Anonim)

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya, tanpa kehilangan semangat.
(Winston Churchill)

You get what you give. Be kind, Always
(Ria Shelawati)

PERSEMBAHAN



Dengan Segala Kerendahan Dan

Ketulusan Hati Kupersembahkan Karya Kecil

Dan Sederhana Ini Untuk:

Kedua Orangtua ku tercinta dan tersayang **Bapak Sukidi, S.Sos dan Ibu Sunting Mas, S.IP** yang telah memberikan cinta dan kasihnya, memberikan semangat dan motivasinya. Yang telah mendidik Kanjeng sampai sekarang dengan penuh kesabaran dan selalu mendoakan yang terbaik buat Kanjeng.

*Kedua Adik ku Tersayang
Dwi Tia Shavera dan M.Gilang Fathur Rahmadi*

Sahabat-sahabat tercinta dan teman-teman seperjuangan

Para Pendidik Tanpa Tanda Jasa Yang Kuhormati

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“Implementasi Program Penggemukan Sapi Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Sapi (Studi Pada Kelompok Tani Makmur Di Desa Karang Endah)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Dalam proses skripsi ini, penulis telah mendapat pengalaman yang luar biasa dan pihak-pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini, baik bantuan moril, materi, berupa petunjuk, bimbingan, nasehat dan saran yang bermanfaat bagi penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Budi Sulistio, S.sos, M.AP selaku Pembimbing Utama. Terima kasih Pak atas saran, nasihat, bimbingan selama proses pengerjaan skripsi, waktu, serta kesabaran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini. Semoga keikhlasan dan ketulusan Bapak dalam mendidik mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, dan menjadi amal yang terus mengalir pahalanya.

3. Ibu Meiliyana, S.IP, M.A selaku Pembimbing Kedua. Terima kasih Bu atas saran, nasihat, bimbingan selama proses pengerjaan skripsi, waktu, serta kesabaran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis benar-benar berterima kasih dan merasa terbantu sekali dengan proses bimbingan.
4. Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku Dosen Pembahas. Terima kasih Pak atas arahan, saran, kritik, masukan, nasihat serta waktu yang telah banyak membantu penulis. Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini juga berkat bantuan dari Bapak.
5. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih atas saran, nasihat, dan masukannya yang telah banyak membantu penulis.
6. Ibu Devi Yulianti, S.AN, M.A selaku dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas semua ilmu yang telah penulis peroleh selama proses perkuliahan. Semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan penulis ke depannya.
8. Ibu Nur selaku Staf Administrasi yang banyak membantu kelancaran administrasi skripsi hingga terselesaikan.
9. Pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang sudah banyak membantu dalam kelancaran penelitian ini. Terkhusus buat ibu Dwita Betarisari, S.Pt selaku Kepala Seksi Budidaya, Bapak Zikro, S.Pt selaku Kepala Seksi Pakan yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya

dalam proses turlap. Terima kasih atas saran, motivasi, dan setiap pengalaman yang Ibu dan Bapak bagikan selama saya melakukan penelitian di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

10. Pihak Kelompok Tani Makmur Desa Karang Endah Bapak Ketua Kelompok Pak Sutrisno, Pak Wasito, Pak Diman, yang sudah banyak membantu dalam kelancaran pembuatan skripsi yang udah mau direpotin, terimakasih kerjasamanya.
11. Papa dan Mama tercinta yang selalu mendoakan setiap saat, mendidik dan membesarkanku sehingga aku bisa menjadi seperti sekarang, kesabaran dalam mengajarkanku, memberikan perhatian yang begitu luar biasa, memberikan semangat, dukungan dan doa yang tiada hentinya untuk hari-hariku, masa depan dan kesuksesanku. Terima kasih banyak, ini semua perjuangan kalian.
12. Adik-adikku Tia dan Gilang . Makasih banyak ya yang suka banget gangguin waktu ngerjain skripsi tapi kadang-kadang baik mau ngalah gantian make laptopnya. Semoga sekolahnya lancar kita bisa bahagiain mama papa, Amin..
13. Novriz Rienchiko yang menemaniku dari SMA, masuk kuliah sampai sekarang. Terima kasih motivasi, perhatian dan doanya akhirnya skripsi ini selesai juga.
14. Sahabat seperjuangan SMA: Atika, Sayu, Yata, Yama, Eno, Rika, Vita, Mona. Terima kasih selalu ada buat saya, dukungannya, masukan-masukan, motivasi-motivasi. Semoga apa yang kita cita-citakan dari jaman SMA terwujud. AMIN!
15. Sahabat perkuliahan M-M yang selalu ada di setiap saat hehe **Aliza Puspita** yang selalu baperan tapi ahli banget dalam bidang fotografi dan makeup, semoga bisa jadi make up artis ya haha. **Ayu Tsanita** yang baik banget

banget pokoknya, suka nebengin kalo mau kuliah super lucu anaknya periang banget selalu ketawa umurnya paling muda tapi bisa jadi bunda buat kita-kita. **Emi Martha** yang super centil dan rempong kadang-kadang tapi semuanya super gercep kalo ngerjain tugas. **Tiara Rifany** yang selalu dengerin curhatanku dan anaknya sabar banget pendiem lagi kalem-kalem gimana gitu hehe dan **Widji Ramadhani** yang tertua dari pada kita-kita, dewasa anaknya pendiem juga tapi selalu cepet kalo ada apa-apa. Terima Kasih atas semangat yang kalian berikan, terima kasih selama 4 tahun ini kita selalu berteman dan gak pernah berantem semoga pertemanan ini bisa bertahan sampai kita tua ya dan semoga semua cita-cita kita tercapai tetep jaga tali silaturahmi sampai kapanpun. See you on top my girls!

16. Yoanita D Masithoh, Mutiara Safitri dan Dianisa. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik selama perkuliahan semoga kita jadi orang yang sukses ya kedepannya, Amin..
17. My Sweetheart Mukti dan Della. Makasih banget semangatnya, buat mukti semoga cepet nyusul dan buat della semangat S2 nya di kota orang, jaga diri ya fokus kuliah jangan main terus!
18. Teman-teman SMP yang sampai sekarang masih suka ketemu, Saliwang 9C Arum, Ulfa, Kemala, Shelyn, Sari, Ema, Viola, Hasven, Maldy, Jaka, Arsy, Sapta. Yang udah pada wisuda semoga cepet daper kerja yang belum semangat garap skripsinya!
19. Temen-temen KKN BD Atika, Ike, Ilham, Zuliansyah yang selalu beda pendapat hehe udah pada kompre tinggal Zul nih, cepet lagi kelarin skripsi zul biar kalau main-main ke rumah pak lurah kita udah pada sarjana hehe.
20. Teman-Teman Seperjuangan AMPERA (Ane12): Putri W, Purnama, Dara, Frisca, Serli, Rischa, Intan, Sylvi, Umay, Dilla, Anisa R, Dian, Stephani,

Novaria, Ghea, Betty, Silvia, Dwini, Oliva, Ajeng, Merie, Ashita, Mona, Yuli, Anggi, Ica, Melda, Lena, Merita, Suci, Imah, Icha, Elin, Dewi, Novita, Ridha, Erna, Yuyun, Ayu W, Bayu, Iyaji, Alga, Imam, Alli, Icup, Ipul, Ikhsan, Endri, Firdaus, Rifky, Hamdhani, Yogi, Ikhwan, Akbar, Bery, Nadiril, Johansyah, Bagus, Danu, Rifky 'cibi', Soleh, Taufik, Putu, Andri, Mamad, Alfajar, Ariswan, Denish, Kiki, Quqila, Irlan, Alan, Eko dan semua yang gak bisa disebut satu-satu. Terima kasih sudah menjadi bagian yang penting dalam masa perkuliahan.

21. Abang dan Mba-mba ANE 011: Mba Vike, Mba Popo, Abang Devin, Abang ciko dan lain-lainnya.
22. Para pembahas dan moderator ku Ayu, Stefani, Friska, Ayu Widya, Emi Martha, makasih yang udah ngeluangin waktu nya buat ngoreksi proposal dan hasil.
23. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuannya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi saya berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Bandar Lampung, 20 September 2016
Penulis

Ria Shelawati

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik.....	15
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	15
2. Jenis Kebijakan Publik.....	17
3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	18
B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik.....	21
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	21
2. Model Implementasi Kebijakan Publik dalam Perspektif George Edward III	23
C. Metode-metode Peningkatan Produksi Ternak Sapi	31
1. Peningkatan Produksi Ternak Sapi Melalui Bibit.....	31
2. Peningkatan Produksi Ternak Sapi Melalui Penggemukan Sapi ..	31
D. Sasaran Program Penggemukan Sapi	32
E. Target Program Penggemukan Sapi	33
F. Kesejahteraan Sosial	33
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	35
B. Fokus Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	42
G. Teknik Keabsahan Data	44
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Provinsi Lampung	48
1. Profil Wilayah Provinsi Lampung.....	48
2. Jumlah Penduduk	50
3. Kependudukan Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin.....	51
4. Kependudukan Berdasarkan Pekerjaan Mayoritas.....	52
B. GAMBARAN UMUM DESA KARANG ENDAH	54
1. Letak Geografis dan Luas Wilayah Desa Karang Endah.....	54
2. Keadaan Penduduk	55

3. Sarana dan Prasarana.....	58
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	61
1. Implementasi Program Penggemukan Sapi Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Sapi	62
2. Faktor Penghambat Implementasi Program Penggemukan Sapi Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Sapi	94
B. Pembahasan	97
1. Pelaksanaan program Penggemukan Sapi dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Peternak	97
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan program Penggemukan Sapi dalm Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Peternak.....	111
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.	Jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan Menurut Wilayah di Provinsi Lampung.....	2
Tabel 2.	Jumlah Konsumsi Daging dan Populasi Penduduk Lampung 2010-2014	4
Tabel 3.	Jumlah Konsumsi Daging antar negara.....	4
Tabel 4.	Luas Lahan Menurut Jenias Penggunaannya di Desa Karang Endah Tahun 2010	9
Tabel 5.	Aplikasi Konseptual Model Edward III Perspektif Implementasi Kebijakan.....	30
Tabel 6.	Informan Terkait Implementasi Program Penggemukan Sapi	39
Table 7.	Dokumen terkait Implementasi Program Penggemukan Sapi.....	41
Tabel 8.	Objek Penelitian Implementasi Program Penggemukan Sapi.....	42
Tabel 9.	Contoh Tabel Triangulasi Implementasi Program Penggemukan Sapi	45
Tabel 10.	Pemanfaatan Lahan Provinsi Lampung 2010.....	50
Tabel 11.	Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2011	51
Tabel 12.	Data Kependudukan Berdasarkan Umur dan Jenias Kelamin.....	52
Tabel 13.	Data Kependudukan Berdasarkan Pekerjaan Mayoritas di Provinsi Lampung.....	53
Tabel 14.	Luas Lahan Menurut Jenias Penggunaannya di Desa Karang Endah Tahun 2010	55
Tabel 15.	Distribusi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia di Desa Karang Endah Tahun 2010	56
Tabel 16.	Distribusi Jumble Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Karang Endah Tahun 2010	57
Tabel 17.	Keadaan Penduduk Desa Karang Endah Berdasarkan Matapencaharian Tahun 2009	58
Tabel 18.	Sarana dan Prasarana di Desa Karang Endah Tahun 2010	59
Tabel 19.	Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Program Penggemukan Sapi	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 1.	Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman	44
Gambar 2.	Peta Provinsi Lampung.....	49
Gambar 3.	Contoh Undangan Acara Sosialisasi Program Penggemukan Sapi.	61
Gambar 4.	Proses Sosialisasi Program Penggemukan Sapi di Desa Karang Endah	65
Gambar 5.	Penyampaian Informasi Langsung dari Dinas Peternakan Kepada Ketua Kelompok Peternak	68
Gambar 6.	Foto Jadwal Monitoring dan Evaluasi Penguatan Pakan Sapi Penggemukan 2015	70
Gambar 7.	Para Pengurus Dari Dinas Peternakan Provinsi Lampung dan Sebagian Anggota Kelompok Peternak	76
Gambar 8.	Dinas Peternakan Provinsi Lampung Melakukan Monitoring	76
Gambar 9.	Lahan Disekitar Kandang Sapi Yang Tidak Baik	82
Gambar 11.	APPO (Alat Pengolah Pupuk Organik)	84
Gambar 12.	Kandang Sapi.....	85
Gambar 13.	Para Pengurus Sedang Monitoring dan Evaluasi.....	87
Gambar 14.	Buku Pedoman Pelaksanaan	90
Gambar 15.	Struktur Kepengurusan Kelompok Tani Makmur	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keadaan masyarakat Indonesia pada saat ini dirasakan masih memprihatinkan. Banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak untuk keberlangsungan hidupnya. Padahal letak Indonesia yang dilintas garis khatulistiwa termasuk ke dalam wilayah beriklim tropis. Wilayah Indonesia yang beriklim tropis, memiliki curah hujan yang tinggi dan menyebabkan tanah menjadi subur. Tanah yang subur cocok untuk tumbuhnya berbagai jenis tanaman penghasil bahan makanan dan bahan pakan ternak, ataupun rerumputan sebagai bahan pakan ternak.

Sebagai negara agraris, sebagian besar bermatapencarian sebagai petani. Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, hampir separuh dari total 28,7 juta penduduk miskin Indonesia atau 13 juta orang adalah petani. Artinya, petani sebagai penghuni terbesar negeri ini justru berada di tingkat terbawah nilai kesejahteraannya (sumber: *www.agronomers.com*, diakses pada 11 Juli 2016). Petani itu sendiri terdiri dari petani ladang, petani sawah dan petani peternak.

Menurut Sugeng (2004: 35), produktivitas sapi potong di Indonesia bahwa ternak sapi potong sebagai salah satu sumber makanan berupa daging, produktivitasnya masih sangat memprihatinkan karena volumenya masih jauh target yang diperlukan konsumen. Rendahnya populasi ternak sapi di negara kita selama ini karena pada umumnya sebagian besar ternak sapi potong yang dipelihara oleh peternak masih dalam skala kecil, dengan lahan dan modal yang sangat terbatas. Lampung sendiri jumlah peternak terbanyak berada di Lampung Tengah, berikut tabel mengenai jumlah rumah tangga usaha peternakan menurut wilayah di Provinsi Lampung:

Tabel 1. Jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan Menurut Wilayah di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Peternak Sapi
1	Lampung Tengah	75,391
2	Lampung Timur	44,250
3	Lampung Selatan	32,635
4	Way Kanan	11,413
5	Lampung Utara	10,728
6	Pesawaran	7,491
7	Tulang Bawang	7,361
8	Lampung Barat	6,383
9	Tulang Bawang Barat	6,356
10	Pringsewu	5,456
11	Mesuji	2,558
12	Tanggamus	1,973
13	Metro	1,661
14	Bandar Lampung	621
Jumlah		214,277

Sumber: Laporan Sensus Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga usaha peternakan yang terbanyak yaitu berapa di Lampung Tengah. Maka dari itu seiring meningkatnya perkembangan jumlah penduduk dan perbaikan taraf hidup penduduk di Lampung, maka permintaan produk-produk untuk pemenuhan gizi pun semakin meningkat, begitu pula dengan permintaan akan bahan pangan seperti permintaan protein hewani. Komoditas daging, telur dan susu merupakan komoditas pangan yang berprotein tinggi memiliki harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan komoditas pangan lainnya.

Salah satu produk peternakan yang meningkat permintaannya yaitu daging sapi. Daging sapi merupakan salah satu komoditas pangan yang selama ini memberikan kontribusi terhadap perbaikan gizi masyarakat, khususnya protein hewani yang sangat dibutuhkan oleh pembangunan manusia. Sebab, daging sapi merupakan sumber protein hewani yang memiliki kandungan protein paling tinggi dibandingkan dari jenis lainnya. Saat ini kebutuhan daging sapi untuk konsumsi penduduk Lampung dirasakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Lampung semakin meningkat setiap tahunnya sesuai dengan kenaikan jumlah penduduk. Hanya di tahun 2014 konsumsi daging menurun dikarenakan sedikitnya ketersediaan daging yang ada sehingga tidak seimbang dengan tingginya populasi penduduk.

Kebutuhan akan daging sapi yang meningkat, tidak berbanding lurus dengan ketersediaan daging sapi, di mana setiap tahun pengadaan daging sapi mengalami penurunan (sumber: *www.lampost.com*, diakses pada 22 November 2015). Hal ini yang mengakibatkan kelangkaan persediaan daging yang menimbulkan harga

daging menjadi tinggi. Berikut adalah tabel jumlah konsumsi daging dan populasi penduduk dari tahun ke tahun:

Tabel 2. Jumlah Konsumsi Daging dan Populasi Penduduk Lampung 2010-2014

No	Tahun <i>Year</i>	Konsumsi Daging (Kg/Kap/Th) <i>Meat Consumption (Gr/Kap/Year)</i>	Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa) <i>Population in mid year (person)</i>
1	2010	7,92	7.569.115
2	2011	7,93	7.691.007
3	2012	7,94	7.877.500
4	2013	7,95	7.932.132
5	2014	7,79	8.026.191

Sumber: Buku Statistik Peternakan Lampung Tahun 2014

Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah konsumsi daging dari tahun 2010-2013 namun di tahun 2014 terjadi penurunan yang disebabkan oleh kurangnya ketersediaan daging sapi sedangkan jumlah penduduk semakin meningkat disetiap tahunnya. Konsumsi daging sebagai sumber protein perkapita pertahun di Indonesia yaitu sebesar 2,2 kg/kapita/tahun. Nilai ini menunjukkan sangat rendahnya konsumsi daging di Indonesia jika dibandingkan negara lainnya, seperti:

Tabel 3. Jumlah Konsumsi Daging Antar Negara

No	Negara	Jumlah Konsumsi Daging (Kg/Kap/Th)
1	Malaysia	15
2	Jerman	45
3	Australia	108,9
4	Amerika Serikat	124

Sumber: antaranews.com , diakses pada 18 Desember 2015

Rendahnya tingkat konsumsi daging ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya karena harga daging yang cukup mahal. Harga daging yang mahal ini salah satunya dipicu oleh kurangnya jumlah ternak penghasil daging dalam negeri dan masuknya daging dari luar negeri. Rendahnya konsumsi daging sapi oleh masyarakat Indonesia semakin diperparah seiring dengan meningkatnya harga daging sapi di pasaran pada tahun 2015.

Harga daging sapi di Kota Bandar Lampung dan daerah-daerah lain di Provinsi Lampung pada Januari 2015 yang semula Rp 70.000-75.000 per kilogram meningkat menjadi Rp 120.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi dipicu oleh naiknya permintaan daging sapi serta berkurangnya stok sapi atau daging sapi dipasaran. Berkurangnya ketersediaan sapi atau daging sapi disebabkan oleh dibatasinya impor sapi bakalan dan daging sapi guna meningkatkan daya saing sapi atau daging sapi lokal. Pembatasan impor tidak diikuti oleh industrialisasi peternakan sapi lokal sehingga ketersediaan sapi dipeternak semakin berkurang (sumber: prariset di Dinas Peternakan Provinsi Lampung pada tanggal 16 November 2015).

Faktor lain yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan sapi atau daging sapi di pasaran juga terkait dengan karakteristik peternakan. Peternak sapi lokal umumnya berusaha dalam skala kecil, bukan usaha komersial tetapi sebagai simpanan atau tabungan masyarakat guna mengantisipasi kebutuhan dimasa yang akan datang, serta lokasi peternakan yang jauh dan sulit dijangkau. Naiknya harga daging sapi dipasaran jika hanya dipicu oleh masalah ketersediaan sapi atau daging sapi seharusnya dapat terselesaikan dengan menambah ketersediaan

melalui impor. Dalam mengatasi terjadinya kekurangan persediaan daging, maka pemerintah mengambil tindakan dengan melakukan impor sapi dari Australia. Permintaan daging sapi yang semakin besar tersebut tidak bisa diimbangi oleh ketersediaan produksi daging sapi lokal, sehingga tidak terjadi keseimbangan pasar.

Namun ternyata hasilnya tidak seperti harapan, di mana kebutuhan daging nasional lebih banyak dicukupi oleh impor, tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi ternak lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak mampu mengoptimalkan usaha peternakan sapi lokal dan pada akhirnya semakin tergantung pada impor daging maupun bakalan sapi untuk memenuhi permintaan akan protein hewani nasional. Kondisi semakin meningkatnya impor daging sapi yang juga termasuk jerohan sapi akan membuat perkembangan usaha peternakan rakyat menjadi terdesak, sehingga perlu adanya proteksi dari pemerintah untuk mengurangi besarnya impor.

Untuk itu pemerintah juga membuat kebijakan untuk membatasi kuota impor baik bakalan maupun daging sapi untuk meningkatkan sumber daya sapi lokal yang selama ini tidak mampu bersaing, yaitu dengan menetapkan volume impor sebesar 500.000 ekor/tahun sejak 2011 hingga semakin menipis menjadi 80.000 ekor untuk periode tahun 2013 (Sumber: ditjennak.pertanian.go.id, diakses pada tanggal 4 Januari 2016). Selain itu, pemerintah juga tidak ingin devisa negara semakin terkuras dengan semakin tingginya nilai impor untuk bakalan maupun daging sapi dan juga bila terus menerus melakukan impor sapi maka kesejahteraan peternak sapi pun akan terancam.

Penetapan kebijakan pembatasan kuota impor sapi memang menjadi angin segar bagi kelangsungan peternak sapi lokal. Keberlangsungan usaha sapi lokal yang tadinya tidak mampu bersaing dengan sapi impor diharapkan bisa membaik dengan adanya kebijakan ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014, bahwa dalam angka memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri perlu upaya pencapaian swasembada daging sapi dan diperlukan suatu program swasembada daging sapi. Maka pemerintah membuat suatu usaha peningkatan pengadaan daging sapi baik dalam jumlah maupun kualitasnya adalah dengan program penggemukkan sapi. Program penggemukkan sapi adalah sapi jantan yang dipelihara dalam kandang tertentu, tidak dipekerjakan tetapi hanya diberi makan dengan nilai nutrisi yang optimal untuk menaikkan berat badan dan kesehatan sapi yang maksimal.

Program penggemukkan sapi ini juga merupakan suatu program pemerintah melalui Dinas Peternakan memberikan bantuan pakan untuk ternak dan melakukan pembinaan peternak sapi disuatu daerah dengan membentuk kelompok-kelompok peternak sapi yang diharapkan menjadi cikal bakal usaha kecil mikro dan menengah dibidang pertanian dan peternakan. (sumber: prariset di Dinas Peternakan Provinsi Lampung pada tanggal 16 November 2015).

Program penggemukkan sapi potong ini bertujuan menghasilkan keuntungan dan meningkatkan produksi daging dalam negeri agar tidak terlalu ketergantungan lagi untuk mengimpor sapi dari luar negeri sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena produksi daging terpenuhi. Berkembangnya usaha kelompok,

meningkatnya pendapatan dan tercapaian kesejahteraan kelompok sasaran dan masyarakat pada umumnya, supaya suatu usaha memperoleh keuntungan yang diharapkan, perencanaan harus dibuat dengan pertimbangan yang matang.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh peternak tradisional dalam peternakan sapi adalah produktivitas ternak sapi yang rendah. Salah satu faktor penyebab rendahnya produktivitas adalah pemilihan pakan ternak yang tidak sesuai dengan sistem penggemukan sapi modern. Para petani tradisional terbiasa menggunakan jerami dan hijau-hijauan sebagai makanan pokok untuk ternak sapi. Sedangkan untuk penggemukan sapi agar lebih intensif dan produktifitas menjadi tinggi maka makanan dengan kandungan protein dan karbohidrat yang tinggi sangat diperlukan.

Program penggemukan sapi ini dilakukan tak hanya dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para peternak saja akan tetapi untuk kesejahteraan masyarakat Lampung itu sendiri. Bila semuanya berjalan dengan baik maka kebutuhan daging di Lampung bisa terpenuhi sehingga tidak akan terjadinya kelangkaan produksi sapi yang menimbulkan susahny mendapatkan daging dan juga harga daging menjadi tinggi. Lampung sendiri merupakan daerah penghasil daging sapi terbanyak di banding daerah lain, dan di Provinsi Lampung sendiri daerah yang banyak melakukan penggemukan sapi berada di Lampung Tengah karena Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi peternakan yang cukup besar $\pm 35\%$ populasi sapi di Provinsi Lampung yang kurang lebih 70% usaha penggemukan sapi berasal dari Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga dengan kondisi tersebut sangat wajar kalau Kabupaten Lampung Tengah dikenal sebagai

Lambung Ternak Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Tengah memiliki 28 Kecamatan dan 297 desa/kelurahan. Masing-masing desa memiliki kelompok tani (POKTAN) yang tergabung ke dalam Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) yang ada di masing-masing kecamatan. Khususnya Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar memiliki 7 desa dan 3 kecamatan yaitu: Desa Adi Jaya, Terbanggi Besar, Onoharjo, Nambah Dadi, Karang Endah, Indra Putra Subing, Poncowati, Yukum Jaya, Bandar Jaya Barat, Bandar Jaya Timur. Desa Karang Endah itu sendiri paling banyak melakukan penggemukan sapi dikarenakan Desa Karang Endah memiliki luas tanah pekarangan yang cocok untuk dilakukan penggemukan sapi.

Tabel 4: Luas lahan menurut jenis penggunaannya di Desa Karang Endah tahun 2010

No.	Jenis Penggunaan	Luas (ha)	Presentase
1.	Sawah Irigasi Teknis	679,5	73,07
2.	Sawah Tadah Hujan	10,0	1,07
3.	Tanah Kering		
	a. Pekarangan	205,0	22,04
	b. Peladangan	10,0	1,07
	c. Lain-lain	25,0	2,69
4.	Perikanan	0,5	0,06
5.	Perkebunan	0	0
6.	Rawa-rawa	0	0
	Jumlah	930,0	100,00

Sumber: Monografi Desa Karang Endah Tahun 2010

Tabel diatas menunjukkan luas lahan di Desa Karang Endah terdapat lahan pekarangan yang cukup luas yaitu 205 ha. Luasnya lahan pekarangan ini menunjukkan bahwa Desa Karang Endah merupakan daerah yang baik untuk usaha penggemukan sapi karena banyaknya luas lahan pekarangan yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pembuatan kandang ternak sapi dalam usaha

penggemukan sapi. Selain itu lahan pekarangan ini juga dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman hijau sebagai pakan ternak sapi. Di Desa Karang Endah itu sendiri memiliki kelompok peternak yang bernama Tani Makmur. Kelompok Tani Makmur merupakan kelompok peternak yang berada dibawah naungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang melakukan Program Penggemukan Sapi.

Pada kenyataannya terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam program penggemukan sapi yang dilaksanakan, antara lain operasionalisasi program yang dilaksanakan. Kendala yang terkadang dialami oleh para peternak adalah susahny mendapatkan bahan pakan ternak, mereka harus mengeluarkan sedikit modal untuk membeli pakan dan terkadang juga ketersediaan rumput di lingkungan mereka minim sehingga para peternak harus mengganti dengan membeli bahan pakan buatan. Kebanyakan para peternak merupakan masyarakat yang kurang mampu sehingga dengan membeli bahan pakan tersebut akan menjadi sedikit beban bagi mereka. Untuk itu dibutuhkan upaya yang maksimal dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung untuk bisa memberikan pengawasan dan bantuan pakan, serta informasi yang jelas bagi seluruh masyarakat petani peternak diberbagai daerah. Sebab dengan adanya strategi pelaksanaan program yang jelas dan struktur organisai berjalan dengan baik serta disposisi dari aparat yang baik pula, diharapkan setiap masyarakat peternak dapat memahami bagaimana penerapan program penggemukan sapi ini dalam upaya meningkatkan kesejahteraan peternak.

Implementasi kebijakan yang ada dalam hal ini adalah Program Penggemukan Sapi pada dasarnya ditujukan untuk menyelesaikan persoalan di bidang peternakan. Keberhasilan atau kegagalan program ini sangat ditentukan oleh pelaksana program, apabila pelaksana program sudah mampu melaksanakannya dengan baik, diharapkan sasaran dari program ini akan dapat terakomodir, karena sebuah program dapat dikatakan baik bukan hanya dilihat dari bentuk program yang dikeluarkan, tetapi apakah program itu sudah mampu menjawab sesuai kebutuhan yang diperlukan, pelaksana program yang baik dan mampu mengakomodir sasaran yang ada dalam hal ini peternak untuk dapat menjawab kebutuhan dan mewujudkan hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu, implementasi merupakan suatu tahapan yang penting dalam kebijakan publik. Meskipun suatu kebijakan telah memiliki tujuan yang baik, namun dalam pengimplementasiannya terjadi kegagalan maka tujuan dari program tersebut tidak akan tercapai. Begitu juga dengan program penggemukan sapi ini, walaupun program ini memiliki tujuan yang baik, namun tidak diimplementasikan dengan baik maka program ini tidak akan berhasil mencapai tujuannya.

Menurut Friedrich dalam Agustino (2008: 7), kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan nyata yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Menurut Sulistio (2013: 39), salah satu gagalnya implementasi kebijakan

disebabkan oleh ketidak layakan kebijakan. Kebijakan publik akan gagal diimplementasikan di lapangan, bilamana kebijakan tersebut tidak layak, baik dari sisi waktu, biaya maupun kebutuhan.

Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Pentingnya implementasi kebijakan ditegaskan oleh Udoji dalam Agustino (2008: 140) yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuat kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapih dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Maka peneliti mengadopsi model implementasi kebijakan yang telah dikembangkan oleh George C. Edward III, karena keempat fokus yang digunakan dalam model implementasi kebijakan publik tersebut dapat membantu menjawab permasalahan peneliti tentang implementasi kebijakan program penggemukan sapi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan peternak sapi di Provinsi Lampung.

Berkaitan dengan hal tersebut, teori utama yang digunakan mengenai teori kebijakan publik menurut Wahab dalam Suharno (2013: 11), kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melihat lebih dekat bagaimana penerapan program penggemukan sapi di

Provinsi Lampung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan peternak sapi dengan judul:

“Implementasi Program Penggemukan Sapi Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Sapi (Studi Pada Kelompok Tani Makmur di Desa Karang Endah)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program penggemukan sapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan peternak sapi di kelompok tani makmur Desa Karang Endah?
2. Apa faktor penghambat dalam implementasi program penggemukan sapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan peternak sapi di kelompok tani makmur Desa Karang Endah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendapatkan gambaran pelaksanaan program penggemukan sapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan peternak sapi di kelompok tani makmur Desa Karang Endah.

2. Teridentifikasinya faktor penghambat implementasi program penggemukan sapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan peternak sapi di kelompok tani makmur Desa Karang Endah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan peneliti, dan menambah penelitian/kajian yang berguna bagi perkembangan ilmu administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini mampu memberikan masukan-masukan bagi para *stakeholder* kebijakan, khususnya dalam pelaksanaan program penggemukan sapi di Provinsi Lampung, serta dapat berguna bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung sehingga menjadi umpan balik (*feed back*) dalam implementasi program penggemukan sapi dan juga dapat menjadi acuan bagi organisasi-organisasi lain dalam mengimplementasikan program-program yang akan dilaksanakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagaimana bentuk layanan itu.

Dye dalam Agustino (2008: 7), mendefinisikan kebijakan publik merupakan upaya yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Sedangkan menurut Islamy dalam Sulistio (2013: 3), kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau beorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Kebijakan menurut Enderson dalam Agustino (2008: 7) yaitu serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Istilah kebijakan publik lebih sering dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan pemerintah.

Sedangkan menurut Sulistio (2013: 3), kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan oleh instansi publik (instansi atau badan-badan Pemerintah) bersama-sama dengan aktor elit politik dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan publik demi kepentingan seluruh masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk kepentingan seluruh masyarakat, yang mampu mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat, baik dilakukan atau tidak dilakukan, pemahaman tersebut sejalan dengan pendapat Islamy menyatakan kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksankan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan demi kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan Negara tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk tujuan, sasaran dari program-program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan pengertian-pengertian kebijakan publik di atas, maka disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan adalah serangkaian tindakan pemerintah yang bersifat

mengatur dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mempunyai tujuan tertentu, berorientasi kepada kepentingan publik (masyarakat) dan bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat.

2. Jenis Kebijakan Publik

Banyak pakar mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. James Anderson menyampaikan kategori tentang kebijakan publik tersebut sebagai berikut:

a. Kebijakan substansif versus kebijakan prosuderal

Kebijakan substansif yakni kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosuderal adalah bagaimana kebijakan substansif tersebut dapat dijalankan.

b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan re-distributif.

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelanggaran terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dimasyarakat.

c. Kebijakan material versus kebijakan simbolis

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumberdaya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan

simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

- d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*).

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Pada penelitian ini membahas mengenai suatu program dari pemerintah dimana pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat, oleh karena itu suatu program termasuk dalam kebijakan publik. Menurut Wahab (2008: 28), bahwa membahas tentang suatu program maka pada umumnya yang dimaksudkan ialah suatu lingkup kegiatan pemerintah yang relatif khusus dan cukup jelas batas-batasnya. Dalam konteks program itu sendiri biasanya akan mencakup serangkaian kegiatan yang menyangkut pengesahan pengorganisasian dan pengerahan atau penyediaan sumber-sumber daya yang diperlukan. Program-program atau sub-sub program dengan demikian dipandang sebagai sarana (instrumen) untuk mewujudkan berbagai tujuan-tujuan yang ingin di capai oleh pemerintah.

4. Tahap-Tahap Kebijakan

Menurut Winarno (2012: 35-37) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses

penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Merupakan tahap penempatan masalah pada agenda publik oleh para pejabat yang dipilih dan diangkat. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini, suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Penelitian Kebijakan atau Evaluasi

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah menarik dampak yang diinginkan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, peneliti akan memfokuskan penelitian ini di tahap implementasi karena sebaik apapun kebijakan bila tidak diimplementasikan maka akan tidak bermanfaat. Dengan membuat kebijakan tersebut pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak terhadap suatu kebijakan/program yang akan dirasakan oleh masyarakatnya. Karena implementasi akan menghasilkan suatu

akibat dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap suatu keputusan kebijakan yang akan dicapai dalam tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, menurut Nugroho (2008: 432). Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012: 149), implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sejalan dengan kutipan di atas maka menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2012: 147) bahwa implementasi adalah suatu yang dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak

bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Sementara itu, menurut Grindel dalam Winarno (2012: 147), juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*”, di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Sebab pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*public service*). Kebijakan yang baik tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dapat diimplementasikan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Berdasarkan

beberapa pengertian di atas mengenai implementasi, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi biasanya menunjukkan seluruh upaya untuk melakukan perubahan melalui sistem baru dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan dalam suatu kebijakan atau program.

2. Model Implementasi Kebijakan dalam Perspektif George Edwards III

Menurut Edward III dalam Agustino (2008: 149), studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration dan public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi- konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka model implementasi kebijakan publik yang berperspektif *top down* dikembangkan oleh Edward III. Pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III mempunyai empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

Keempat variabel dalam model yang dibangun oleh Edward III tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain. Sementara itu, model yang dikemukakan Edwards III dalam Agustino (2008: 149) implementasi atau pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

1. Komunikasi.

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program/kebijakan. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan. Menurut Edward III dalam Winarno (2012: 178), persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Akan tetapi, banyak hambatan-hambatan yang menghadang transmisi komunikasi-komunikasi pelaksanaan dan hambatan-hambatan ini mungkin menghalangi pelaksanaan kebijakan. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran. Dengan demikian untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang intensif tentang kebijakan yang dimaksud. Sosialisasi dalam hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya melalui media cetak ataupun media elektronik.

Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu :

- b. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi atau pelaksanaan yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi pelaksanaan tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
 - c. Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi pelaksanaan kebijakan atau program, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan program, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
 - d. Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.
2. Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi pelaksana atau implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya adalah faktor penting untuk pelaksanaan program agar efektif, dimana tanpa sumberdaya maka program atau kebijakan

hanya sekedar kertas dokumen. Sedangkan menurut Winarno (2012: 184), Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Tanpa sumber daya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi sekedar angan-angan ataupun dokumen di atas kertas semata. Edward III dalam Agustino (2008: 151) menyatakan bahwa hal ini meliputi empat komponen, yaitu :

a. Staf

Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang seiring terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi

Informan dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut payuh terhadap hukum.

c. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimana publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

d. Fasilitas, merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen aparat pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi pelaksana atau implementor dari

program, dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan atau program, sedangkan apabila implementor atau pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi atau pelaksanaan program juga menjadi tidak efektif.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III dalam Agustino (2008: 152), adalah:

- a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b. Intensif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam Nugroho (2008: 636), bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga Negara atau pemerintah.

Menurut Edward III dalam Agustino (2008: 153), dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik yaitu : melakukan *Standar Operating Procedure* (SOP) dan pelaksanaan fragmentasi. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Variabel-variabel kebijakan bersangkutan dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana yang meliputi baik organisasi formal maupun informal, sedangkan komunikasi antara organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antara hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan para pelaksana mengantarkan kita pada pemahaman mengenai orientasi dari mereka yang telah mengoperasionalkan program di lapangan.

Tabel 5. Aplikasi Konseptual Model Edward III Perspektif Implementasi Kebijakan

Aspek	Ruang Lingkup
Komunikasi	a. Implementor dan kelompok sasaran dari program/kebijakan b. Sosialisasi program/kebijakan efektif dijalankan - Metode yang digunakan - Intensitas Komunikasi
Sumber Daya	a. Kemampuan Implementor - Tingkat pendidikan - Tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta aplikasi detail program - Kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan b. Ketersediaan Dana - Dana yang dialokasikan - Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk implementasi program/kebijakan
Disposisi	Karakter Pelaksana a. Tingkat komitmen dan kejujuran dapat dikur dengan tingkat konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan. Semakin sesuai dengan standar semakin tinggi komitmennya. b. Tingkat demokratis dapat dengan intensitas pelaksana melakukan proses sharing dengan kelompok sasaran, mencari solusi dan masalah yang dihadapi dan melakukan diskresi yang berbeda dengan standar guna mencapai tujuan dan sasaran program.
Struktur Birokrasi	a. Ketersediaan SOP yang mudah dipahami b. Struktur organisasi, rentang kendali antara dan lambat pucuk pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana. Semakin jauh berarti semakin rumit, birokratis dan lambat untuk merespon perkembangan program.

Sumber : Indiahono (2009: 34)

Model implementasi inilah yang akan digunakan penulis dilapangan untuk menganalisis program penggemukan sapi dalam meningkatkan kesejahteraan Peternak Sapi di Provinsi Lampung. Alasan penulis menggunakan model ini karena variabel ataupun indikator yang dikemukaakan oleh George Edward III merupakan variabel yang bisa menjelaskan secara komprehensif tentang kinerja

implementasi dan dapat lebih kongkret dalam menjelaskan proses implementasi sebenarnya.

C. Metode-metode Peningkatan Produksi Ternak Sapi

1. Peningkatan produksi ternak sapi melalui bibit

Menurut Sugeng (2004: 35), sehubungan dengan peningkatan produksi melalui peningkatan mutu bibit bisa dilakukan dengan usaha penyilangan sapi lokal dengan sapi unggul dari luar. Atau, dengan bangsa sapi luar yang diadaptasinya baik. Oleh karena itu, akhir-akhir ini pemerintah telah pula mendatangkan sapi-sapi jenis unggul ke Indonesia, yaitu brahman, hereford, shorthorn, chalais, aberdeen angus, limousine, simmental dan lain-lain. Jadi, sebagaimana diutarakan di muka bahwa ada berbagai cara untuk melakukan peningkatan ternak sapi potong melalui bibit, berikut ini diuraikan secara rinci sebagai berikut:

- a. Dengan cara kawin silang
- b. Persilangan antara sapi bali betina dan Bos taurus jantan
- c. Persilangan antara sapi tipe pedaging keturunan Bos taurus dan brahman

2. Peningkatan produksi ternak sapi melalui penggemukan sapi

Penggemukan sapi adalah usaha pemeliharaan ternak dengan cara mengandangkan secara terus-menerus selama periode tertentu yang bertujuan meningkatkan produksi daging dengan mutu yang lebih baik sebelum ternak dipotong. Untuk itu kebutuhan nutrisinya harus terpenuhi dengan baik, sehingga mampu memacu peningkatan bobot badan sapi dalam waktu singkat. Usaha penggemukan sapi potong sistem kreman adalah usaha ini meliputi

kegiatan pemeliharaan sapi untuk memperoleh bobot badan yang layak untuk dijual (sumber: www.ilmuternak.com, diakses pada 20 November 2015).

Ferdiman dalam Suryana (2008: 8) yang mengatakan bahwa penggemukan sapi potong dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sistem kereman, *dry lot fattening*, dan *pasture fattening*. Pakan yang digunakan dalam penggemukan berupa hijauan dan konsentrat. Hijauan diberikan 10% dari bobot badan, konsentrat 1% dari bobot badan, dan air minum 20–30 l/ekor/hari.

Program penggemukan sapi merupakan suatu program pemerintah melalui Dinas Peternakan memberikan bantuan pakan dan melakukan pembinaan peternakan sapi disuatu daerah dengan membentuk kelompok-kelompok peternakan sapi yang diharapkan menjadi cikal bakal usaha kecil mikro dan menengah dibidang pertanian dan peternakan. (sumber: prariset di Dinas Peternakan Provinsi Lampung pada tanggal 16 November 2015).

Program ini diarahkan pada pembudidayaan dan penggemukan sapi dalam rangka pemberdayaan masyarakat pedesaan yang berbasis sumber daya lokal. Kelompok target merupakan petani peternak yang telah memelihara sapi tetapi memiliki keterbatasan modal dan keterampilan dalam berusaha tani. Setiap anggota kelompok diberikan penguasaan untuk memelihara ternak sapi serta sarana produksi yang digulirkan melalui bantuan modal usaha oleh pemerintah pusat melalui Dirjen Peternakan Departemen Pertanian.

D. Sasaran Program Penggemukan Sapi

Sasaran yang akan diperoleh dari budidaya dan penggemukan sapi melalui pola pemberdayaan kelompok masyarakat adalah:

- a. Meningkatkan produksi dan produktifitas sapi potong.
- b. Berkembangnya usaha kelompok, meningkatnya pendapatan dan tercapaian kesejahteraan kelompok sasaran dan masyarakat pada umumnya.
- c. Meningkatnya kemandirian kelompok
- d. Terbukanya peluang usaha dan ekonomi pedesaan.

E. Targer Program Penggemukan Sapi

- a. Petani – peternak binaan terampil dan professional dalam melakukan usaha budidaya ternak sapi melalui penerapan teknologi tepat guna.
- b. Meningkatkan populasi ternak sapi di wilayah pilot program dari populasi sebelumnya.
- c. Terciptanya wadah kelompok usaha peternakan yang mandiri dan fungsional pedesaan yang berbasis sumber daya lokal.

F. Kesejahteraan Sosial

Menurut Adi (1994: 3) kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Menurut Friedlander dalam Adi (1994: 4) Kesejahteraan sosial merupakan system yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial, yang dirancang untuk membentuk individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan.

Pelayanan–pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian terhadap individu–individu, kelompok–kelompok, komunitas–komunitas dan kesatuan–kesatuan penduduk yang lebih luas. Hal ini merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan harus saling membantu,

agar kehidupan ini berjalan selaras dan harmonis menciptakan suasana yang sejahtera. Tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu.

Menurut Mendoza dalam Adi (1994: 8) ada tiga tujuan utama yang terkait dengan kesejahteraan sosial: 1) Tujuan yang bersifat kemanusiaan dan keadilan sosial. Tujuan kesejahteraan sosial ini berakar dari gagasan ideal demokratik mengenai keadilan sosial, dan hal ini berasal dari keyakinan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. 2) Tujuan yang terkait dengan pengendalian sosial. Tujuan ini berdasarkan pemahaman bahwa kelompok yang tidak diuntungkan; kekurangan; ataupun tidak terpenuhi kebutuhannya dapat melakukan “serangan” (baik secara individu ataupun kelompok) terhadap masyarakat (terutama yang sudah mapan). 3) Tujuan yang terkait dengan pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi memprioritaskan pada program-program yang dirancang untuk meningkatkan produksi barang dan pelayanan yang dapat diberikan, ataupun berbagai sumber daya lain yang dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan ekonomi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013: 4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti memilih penelitian ini karena penelitian kualitatif bersifat menyeluruh, dinamis, dan tidak mengeneralisasi. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian dalam melihat bagaimana proses pelaksanaan program penggemukan sapi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan peternak sapi. Studi deskriptif kualitatif adalah suatu metode untuk menggambarkan suatu gejala-gejala sosial atau berusaha mendeskripsikan fenomena sosial tertentu secara terperinci.

B. Fokus Penelitian

Untuk mempertajam penelitian ini maka dalam penelitian kualitatif perlu menetapkan fokus. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial. Fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah pokok yang bersumber

dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya. Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif sangat penting karena untuk membatasi studi dan mengarahkan pelaksanaan dan pengamatan. Pada masalah penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Oleh karena itu, peneliti memberikan pembatasan penelitian melalui fokus penelitian. Penelitian ini difokuskan kepada : menggambarkan dan menganalisa Implementasi Program Penggemukan Sapi di Kelompok Tani Makmur Desa Karang Endah dengan model implementasi George C. Edward III. Indikator-indikator model tersebut adalah:

1. Implementasi program penggemukan sapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan peternak di Kelompok Tani Makmur Desa Karang Endah.
 - a. Komunikasi
 - 1) Transmisi, penyampaian informasi tentang proses pelaksanaan program penggemukan sapi di Kelompok Tani Makmur Desa Karang Endah.
 - 2) Kejelasan, kejelasan penyampaian informasi tentang program penggemukan sapi di Kelompok Tani Makmur Desa Karang Endah yaitu meliputi teknis pelaksanaan program, syarat dan ketentuan serta waktu pelaksanaan.
 - 3) Konsistensi, konsistensi dalam melaksanakan program penggemukan sapi, yaitu tentang pelaksanaan penyuluhan penggemukan sapi.

b. Sumber Daya (*Resources*)

- 1) Staff, berkenaan dengan cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan Program Penggemukan Sapi di Kelompok Tani Makmur Desa Karang Endah.
- 2) Informasi, informasi meliputi kegiatan dan penyuluhan rutin pada petani peternak.
- 3) Wewenang, kewenangan yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan program Penggemukan Sapi Kelompok Tani Makmur Desa Karang Endah.
- 4) Fasilitas, fasilitas yang dimiliki dalam melaksanakan program sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam melaksanakan Program Penggemukan sapi di Kelompok Tani Makmur Desa Karang Endah.

c. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan sikap positif pelaksanaan untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi tujuan dalam implementasi program penggemukan sapi di Kelompok Tani Makmur Desa Karang Endah.

d. Struktur birokrasi

- 1) *Standar Operation Procedure* (SOP) yang digunakan dalam menjalankan kebijakan program Penggemukan Sapi di Kelompok Tani Makmur Desa Karang Endah .
- 2) Penyebaran tanggung jawab atas bidang kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi kewenangan, dan tanggung jawab dalam implementasi program penggemukan sapi di Kelompok Tani Makmur Desa Karang Endah.

2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi program penggemukan sapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan peternak di kelompok tani makmur Desa Karang Endah.

C. Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2013: 86), lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama sekali dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi, dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penelitian ini dilakukan di lingkup Provinsi Lampung. Penulis memilih penelitian di dalam lingkup Provinsi Lampung dikarenakan Lampung merupakan salah satu provinsi yang menjadi daerah yang menyediakan pasokan daging ke provinsi lainnya. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dikarenakan Dinas Peternakan ini merupakan instansi yang menangani program penggemukan sapi di Provinsi Lampung. Dan juga kelompok peternak di Desa Karang Endah, Kecamatan terbanggi besar, Kabupaten Lampung Tengah juga dijadikan lokasi penelitian karena desa ini memiliki kelompok-kelompok peternak terbanyak yang berada dinaungan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau obyek penelitian menurut Tresiana (2013: 86). Sumber data ditulis atau direkam. Wawancara dilakukan kepada informan yang dipilih, wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara mengenai implementasi program penggemukan sapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan peternak sapi di Kelompok Tani Makmur Desa Karang Endah. Adapun yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Dwita Betarisari, S.Pt	Kepala Seksi Budidaya	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
2.	Zikro, S.Pt	Kepala Seksi Pakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
3.	Sukidi, S.Sos	Fungsional Umum Bidang Sarana dan Prasarana	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
4.	Sutrisno	Ketua Kelompok Peternak	Peternak Desa Karang Endah
5.	Wasito	Anggota Kelompok Peternak	Peternak Desa Karang Endah
6.	Diman	Anggota Kelompok Peternak	Peternak Desa Karang Endah

Sumber: Diolah Peneliti 2016

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi dari data primer. Data sekunder merupakan sumber data tidak langsung memberikan data kepada peneliti atau misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen-dokumen menurut Sugiyono (2013: 225). Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data

sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa berita surat kabar, artikel, website, serta referensi-referensi yang menjadi panduan penyusunan kebijakan Provinsi Lampung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013: 231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini peneliti harus dapat mengetahui tahap-tahap yang akan dilalui sebelum melakukan wawancara agar data yang diinginkan bisa tercapai sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan informan-informan mengenai implementasi program penggemukan sapi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan peternak sapi.

2. Teknik Dokumentasi

Menurut Moleong (2013: 216) dokumen ialah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Maksud mengumpulkan dokumen ialah untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di sekitar subyek penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dalam kata lain adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, dan arsip-arsip yang ada pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

Tabel 7: Dokumen terkait Implementasi Program Penggemukan Sapi

No	Dokumentasi
1	Pedoman Pelaksanaan Penguatan Pakan Sapi Penggemukan di terbitkan oleh Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015
2	Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/2010 tentang pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014, bahwa dalam angka memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri perlu upaya pencapaian swasembada daging sapi dan diperlukan suatu program swasembada daging sapi.
3	Jadwal Monitoring dan Jadwal Kegiatan Penggemukan Sapi

Sumber: diolah peneliti 2016

3. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pegamatan langsung di lapangan. Observasi yang digunakan adalah observasi tidak terstruktur karena pengamatan dilakukan ketika menemukan data-data di lapangan yang dibutuhkan (tanpa ditentukan terlebih dahulu). Adapun observasi yang peneliti lakukan yaitu mengamati secara langsung apa saja

fasilitas yang ada di lapangan dalam pelaksanaan program penggemukan sapi di kelompok tani makmur Desa Karang Endah.

Tabel 8: Objek Penelitian Implementasi Program Penggemukan Sapi

No.	Objek Penelitian	Tempat	Waktu
1	Fasilitas yang ada seperti kandang sapi, APPO (Alat Pengolah Pupuk Organik),	Desa Karang Endah	19 Maret 2016

Sumber: diolah peneliti, 2016

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman dalam Sugiyono, (2013: 246) . Miles and Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data :

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian penulis dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan penelitian yakni implementasi program penggemukan sapi di Provinsi Lampung.

2. Penyajian Data

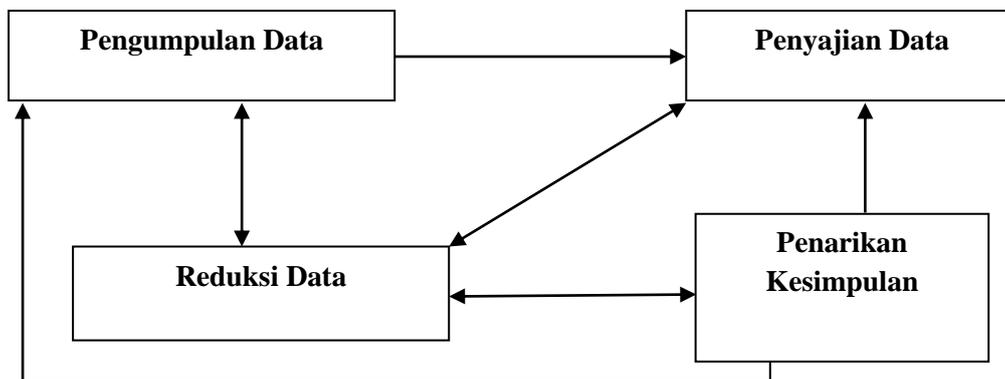
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran serta keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, foto, dan gambar.

3. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu dengan melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal penelitian dan selama proses pengumpulan data yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan inti sari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan konsep implementasi program penggemukan sapi di Kelompok Tani Makmur Desa Karang Endah. Berikut ini merupakan gambaran model interaktif yang diajukan Miles dan Huberman:



Gambar 1. Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman

Sumber : Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013: 247)

G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut Moleong (2013: 324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data

a. Triangulasi

Menurut Moleong (2013: 330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainnya. Menurut Denzin dalam Moleong (2013: 330) ada empat macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik pengumpulan data, dan sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain. . Berikut ini adalah contoh tabel triangulasi dalam implementasi program penggemukan sapi di Kelompok Tani Makmur Desa Karang Endah.

Tabel 9: Contoh Tabel Triangulasi Implementasi Program Penggemukan Sapi di Provinsi Lampung

No	Informan	Wawancara	Observasi	Dokumentasi	Keterangan
1	Ibu Dwita Betarisari, selaku Kepala Seksi Budidaya	“Sistem penyampaian informasi mengenai program penggemukan sapi ini yaitu kita mengundang dinas dari kabupaten lalu kita mengadakan musrembang dan mensosialisasikan program ini lalu	Proses penyampaian informasi program penggemukan sapi dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui indikator transmisi pada implementasi kebijakan program penggemukan sapi berjalan

		memberikan uraian tugas dan tanggung jawab sesuai keputusan yang di tetapkan”	Provinsi Lampung kepada para kelompok peternak		dengan cukup baik, karena informasi sudah tepat sasaran.
--	--	---	--	--	--

Sumber: diolah peneliti 2016

b. Kecukupan Referensial

Kecukupan referensial yaitu, dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku tentang kebijakan publik dan penggemukan sapi, buku statistik peternakan tahun 2014, pedoman pelaksanaan penguatan pakan sapi potong penggemukan tahun 2015, catatan penelitian, dokumentasi foto-foto dan rekaman wawancara penelitian di lapangan.

2. Teknik Pemeriksaan Keteralihan Data.

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian setelah dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima.

Upaya untuk memenuhi hal tersebut, peneliti melakukannya melalui tabel data yang disajikan oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan.

3. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitass dalam penelitian yang nonkualitatif. Uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti selalu mendiskusikannya dengan dosen pembimbing.

4. Kepastian Data.

Pengujian kepastian dalam penelitian kualitatif hampir sama dengan uji kebergantungan, sehingga pengujiannya dilakukan peneliti dengan mendiskusikannya kepada dosen pembimbing dan dosen pembahas. Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian yang sudah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Lampung

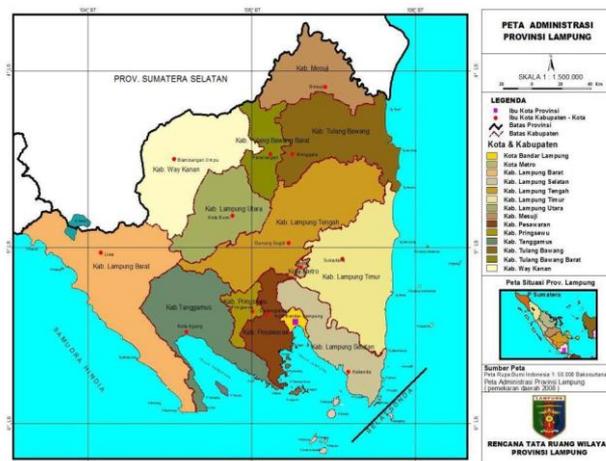
1. Profil Wilayah Provinsi Lampung

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan $103^{\circ}40''$ (BT) Bujur Timur sampai $105^{\circ}50''$ (BT) Bujur Timur dan $3^{\circ}45''$ (LS) Lintang Selatan sampai $6^{\circ}45''$ (LS) Lintang Selatan. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km (Lampung dalam angka, BPS, 2013) termasuk 132 pulau di sekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas. Luas perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan lebih kurang 24.820 km (atlas Sumberdaya Pesisir Lampung, 1999). Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km).

Provinsi Lampung dengan ibu kota Bandar Lampung meliputi areal daratan seluas 35.288,35 Km² termasuk 188 pulau yang terletak pada bagian paling

ujung Tenggara Pulau Sumatera. Secara administratif Provinsi Lampung dibagi kedalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota yang terdiri atas: 1) Kabupaten Tulang Bawang dengan ibu kota Menggala; Kabupaten Lampung Barat dengan ibu kota Liwa 2) Kabupaten Lampung Tengah dengan ibu kota Gunung Sugih 3) Kabupaten Lampung Timur dengan ibu kota Sukadana 3) Kabupaten Way Kanan dengan ibu kota Blambangan Umpu 4) Kabupaten Tanggamus dengan ibu kota Kota Agung 4) Kabupaten Lampung Selatan dengan ibu kota Kalianda 5) Kabupaten Lampung Utara dengan ibu kota Kotabumi 6) Kabupaten Pesawaran dengan ibu kota Gedung Tataan 7) Kota Bandar Lampung 8) Kota Metro 9) Kabupaten Pringsewu dengan ibu kota Pringsewu 10) Kabupaten Mesuji dengan ibu kota Mesuji 11) Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibu kota Panaragan 12) Kabupaten Pesisir Barat dengan ibu kota Krui.

Untuk mengetahui wilayah administrasi Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2. Peta Provinsi Lampung.
Sumber : RPJMD Provinsi Lampung tahun 2015

Sebagian besar lahan di Provinsi Lampung merupakan kawasan hutan yaitu mencapai 1.004.735 Ha (28,47 %) dari luas daratan Provinsi Lampung. Selain itu merupakan daerah perkebunan (20,92%); tegalan/ladang (20,50%); daerah pertanian, dan perumahan. Selain itu, pemanfaatan lahan di Provinsi Lampung dapat dilihat secara rinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 10: Pemanfaatan Lahan Provinsi Lampung tahun 2010

No.	Pemanfaatan	Luas	Persentase (%)
1	Permukiman	2.321,83	6.58
2	Sawah	205,5	0.58
3	Pertanian lahan kering	21.492	60.90
4	Perkebunan	1.231,31	3.49
5	Hutan	2.080,26	5.90
6	Rawa, sungai, tubuh air	170,44	0.48
7	Tambak	340,87	0.97
8	Mangrove	4,36	0.01
9	Savana dan semak belukar	4.780,84	13.55
10	Tambang dan tanah terbuka	2.407,09	6.82
11	Penggunaan lainnya	253,83	0.72
Jumlah		35.288,35	100%

Sumber : Data Badan Pusat Statistik tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pemanfaatan lahan di Provinsi Lampung secara berturut-turut yang paling besar ialah pada lahan pertanian lahan kering sebesar 60,90 %, sementara untuk lahan perkebunan berada di posisi ke enam yaitu sebesar 3,49 %.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2011 mencapai 9.327.445 jiwa dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebesar 1.444.733 jiwa. Jumlah penduduk perkabupaten selanjutnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 11: Jumlah penduduk Provinsi Lampung tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Lampung Barat	229.881	209.945	439.826
2	Tanggamus	327.985	303.007	630.992
3	Pringsewu	198.434	185.818	384.252
4	Lampung Selatan	553.330	526.461	1.079.791
5	Lampung Timur	539.546	569.469	1.109.015
6	Lampung Tengah	743.773	700.960	1.444.733
7	Lampung Utara	400.665	379.443	780.108
8	Way Kanan	240.634	228.209	468.843
9	Tulang Bawang	209.562	208.089	417.651
10	Tulang Bawang Barat	132.583	135.852	268.435
11	Mesuji	135.213	121.361	256.574
12	Bandar Lampung	703.508	661.251	1.364.759
13	Metro	84.608	81.844	166.452
14	Pesawaran	267.990	248.024	516.014
Jumlah		4.767.712	4.559.733	9.327.445

Sumber : Data Badan Pusat Statistik tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas bahwa pada tahun 2011 jumlah penduduk Provinsi Lampung sebesar 9.327.445 dengan perbandingan laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, yaitu perempuan sebesar 4.559.733 dan laki-laki sebesar 4.767.712.

3. Kependudukan Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2014 yang berdasarkan umur dan jenis kelamin berjumlah 8.026.191 jiwa dengan jumlah angka tertinggi berada pada umur 0 – 4 yaitu 802.072 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan umur selanjutnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 12: Data Kependudukan Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	409605	392468	802073
5 – 9	389210	368336	757546
10 – 14	369054	349363	718417
15 – 19	365092	341722	706814
20 – 24	351171	329969	681140
25 – 29	341963	321713	663676
30 – 39	332869	321428	654297
35 – 39	325461	311052	636513
40 – 44	293293	277724	571017
45 – 49	251002	240241	491243
50 – 54	210952	200834	411786
55 – 59	168022	150322	318344
60 – 64	118588	104034	222622
65 – 69	76879	76490	153369
70 – 74	55781	56800	112581
75 +	58537	66216	112753
Jumlah	4117479	3908712	124753

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2016

4. Kependudukan Berdasarkan Pekerjaan Mayoritas

Penduduk Lampung mempunyai pekerjaan mayoritas yang berbeda-beda, karena setiap penduduk mempunyai keahlian sendiri disetiap pekerjaan mereka. Dapat dilihat bermacam pekerjaan mayoritas di Provinsi Lampung pada tahun 2014-2016 dari tabel berikut:

Tabel 13: Data Kependudukan Berdasarkan Pekerjaan Mayoritas di Provinsi Lampung, Februari 2014-Februari 2016 (Ribuan)

Lapangan Pekerjaan	2014		2015		2016
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
Industri	313,8	292,2	372,6	331,4	375,4
Jasa Masyarakat, Sosial dan Perorangan	518,5	525,0	521,7	409,0	451,6
Konstruksi	136,6	182,9	206,6	222,9	181,2
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan	63,5	52,8	59,3	55,1	67,3
Listrik, Gas dan Air Minum	3,2	4,5	4,3	5,8	9,7
Pertambangan dan Penggalian	42,7	15,2	36,4	28,9	20,8
Perdagangan, Rumah Makan & Jasa Akomodasi	756,1	662,8	724,3	685,6	750,6
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pemburuan & Perikanan	1855,3	1795,2	1847,9	1773,1	1859,3
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	134,4	142,6	148,0	123,4	138,9
Total	3824,2	3673,2	3921,2	3635,3	3854,8

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2016

Dilihat dari tabel di atas bahwa penduduk Provinsi Lampung mayoritas bekerja di bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pemburuan dan Perikanan, karena mencapai angka terbanyak yaitu 1.859.300 jiwa di tahun 2016. Dan mayoritas terbanyak ke dua yaitu di bidang Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi yaitu berjumlah 750.600 jiwa.

B. GAMBARAN UMUM DESA KARANG ENDAH

1. Letak Geografis dan luas wilayah Desa Karang Endah

Desa Karang Endah terletak 9 km dari ibukota Kecamatan Terbanggi Besar dan 68 km dari Ibukota Provinsi Lampung. Deasa Karang Endah memiliki luas 930 ha, terdiri dari 8 dusun 41 rukun tetangga. Adapun batas-batas wilayah Desa Karang Endah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Terbanggi Besar
- b. Sebelah Selatan berbatasa dengan Desa Indra Putra Subing
- c. Sebelah Barat berbatasan Kelurahan Yukum Jaya
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nambah Dadi

2. Topografi dan Iklim

Sebagian besar Desa Karang Endah merupakan daratan rendah dengan ketinggian berkisar antara 0-750 m di aras oermukaan laut, dengan suhu berkisar antara 20-28°C yang dicirikan dengan blan basah selama enam bulan Desember sampai bulan Juni dan bulan kering pada bulan Juli sampai dengan November pada setiap tahunnya dengan kelembaban udara berkisar antara 80-88% dan curah hujan rata-rata 2500-3000 mm/tahun.

3. Penggunaan Lahan

Desa Karang Endah memiliki luas 930 ha. Hampir sebagian besar luas yang ada di Desa Karang Endah digunakan untuk lahan pertanian. Adapun luas Desa Karang Endah menurut penggunaan lahannya dapat diluhat pada tabel berikut.

Tabel 14: Luas lahan menurut jenis penggunaannya di Desa Karang Endah tahun 2010

No.	Jenis Penggunaan	Luas (ha)	Presentase
1.	Sawah Irigasi Teknis	679,5	73,07
2.	Sawah Tadah Hujan	10,0	1,07
3.	Tanah Kering		
	d. Pekarangan	205,0	22,04
	e. Peladangan	10,0	1,07
	f. Lain-lain	25,0	2,69
4.	Perikanan	0,5	0,06
5.	Perkebunan	0	0
6.	Rawa-rawa	0	0
	Jumlah	930,0	100,00

Sumber: Monografi Desa Karang Endah Tahun 2010

Tabel diatas menunjukkan luas lahan di Desa Karang Endah terdapat lahan pekarangan yang cukup luas yaitu 205 ha. Luasnya lahan pekarangan ini menunjukkan bahwa Desa Karang Endah merupakan daerah yang baik untuk usaha penggemukan sapi karena banyaknya luas lahan pekarangan yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pembuatan kandang ternak sapi dalam usaha penggemukan sapi. Selain itu lahan pekarangan ini juga dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman hijauan sebagai pakan ternak sapi.

4. Keadaan Penduduk

Desa Karang Endah pada tahun 2009 mempunyai jumlah penduduk 8.539 jiwa (1.732 KK). Terdiri dari penduduk laki-laki 4.342 jiwa dan perempuan 4.197 jiwa yang tersebar di 8 dusun. Distribusi penduduk Desa Karang Endah berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 15: Distribusi penduduk berdasarkan kelompok usia di Desa Karang Endah Tahun 2010

Kelompok Usia (tahun)	Keterangan	Jumlah (orang)	Presentasi
<15	Belum bekerja	3.223	37,85
15-64	Usia Kerja	5.089	59,60
≥64	Tidak bekerja	217	2,44
Jumlah		8.539	100.00

Sumber: Monografi Desa Karang Endah Tahun 2010

Tabel 14 menunjukkan bahwa penduduk di Desa Karang Endah sebagian besar termasuk dalam kelompok usia produktif yaitu berjumlah 5.089 orang. Penduduk usia yang produktif di desa Karang Endah cukup besar mampu menyediakan tenaga kerja disektor peternakan terutama dalam penggemukan sapi.

a. Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan formal, Desa Karang Endah memiliki jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 16: Distribusi jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Karang Endah Tahun 2010

No	Indikator	Sub Indikator	Jumlah Penduduk (orang)
1	Tingkat pendidikan penduduk usia > 15 tahun	Jumlah penduduk buta huruf	178
		Jumlah penduduk tidak tamat SD	754
		Jumlah penduduk tidak tamat SD	1.011
		Jumlah penduduk tamat SMP	1.791
		Jumlah penduduk tamat SMA	1.257
		Jumlah penduduk tamat D1	67
		Jumlah penduduk tamat D2	38
		Jumlah penduduk tamat D3	86
		Jumlah penduduk tamat S1	112

		Jumlah penduduk tamat S2 Jumlah penduduk tamat S3	12 0
2	Wajib belajar 9 tahun dan angka putus sekolah	Jumlah penduduk usia 7-15 tahun masih sekolah Jumlah penduduk usia 7-15 tahun putus sekolah	1.064 1.252

Sumber: Monografi Desa Karang Endah Tahun 2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk di Desa Karang Endah yang tamat pendidikan Sekolah Menengah Pertama berjumlah paling besar yaitu 1.791 (20,79%) orang. Hal ini harus diperbaiki, agar di masa yang akan datang banyak penduduk yang berpendidikan tinggi, sehingga taraf kehidupan dan system berfikir akan lebih baik dan akan berdampak pada pencapaian tujuan yang diinginkan oleh penduduk di Desa Karang Endah, termasuk kemajuan di bidang usaha penggemukan sapi.

b. Keadaan Penduduk Menurut Mata pencaharian

Sebagian besar penduduk di Desa Karang Endah memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja pada bidang pertanian dan peternakan, selebihnya bekerja pada industri rumah tangga, perdagangan dan jasa, Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI, dan lain-lain. Distribusi penduduk berdasarkan matapencaharian di Desa Karang Endah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 17: Keadaan Penduduk Desa Karang Endah berdasarkan
Matapencaharian Tahun 2009**

Jenis Pekerjaan	Jumlah KK	Presentase
Pertanian	1.450	83,71
Perdagangan dan jasa	157	9,04
Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI	75	4,33
Industri rumah tangga	27	1,55
Lain-lain	23	1,32
Jumble	1.732	100,00

Sumber: Monografi Desa Karang Endah Tahun 2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa 83,71% atau sebanyak 1.450 kepala keluarga (KK) dari 1.732 kepala keluarga berprofesi sebagai petani, baik sebagai petani padi sawah maupun sebagai petani peternak sapi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduk di Desa Karang Endah bermatapencaharian sebagai petani.

5. Sarana dan Prasarana

Pembangunan sarana dan prasarana sangat penting untuk menunjang pembangunan suatu daerah guna meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Sarana dan prasarana yang ada di Desa Karang Endah diperoleh dari swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah. Sarana dan prasarana yang dimiliki Desa Karang Endah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18: Sarana dan Prasarana di Desa Karang Endah tahun 2010

No	Sarana/Prasarana	Jenis	Jumlah (unit)
1	Kemasyarakatan	Balai desa	1
		Kantor desa	1
2	Sarana Pendidikan	Taman Kanak-kanak	1
		Sekolah Dasar	1
		Sekolah Menengah Pertama	1
3	Sarana Kesehatan	Posyandu	1
		Puskesmas	1
4	Sarana Olahraga	Lapangan Bola	1
		Lapangan Voli	1
5	Sarana Sosial	Pasar Tradisional	1
		Rumah Ibadah	4
6	Sarana Transportasi	Mikrolet	3
		Becak	4
		Gerobak	7

Sumber: Monografi Desa Karang Endah tahun 2010

Tabel di atas menunjukkan Desa Karang Endah memiliki balai desa yang digunakan untuk kegiatan desa diantaranya pertemuan anggota kelompok tani dengan penyuluh pertanian. Selain itu Desa Karang Endah juga memiliki keadaan jalan baik karena sudah beraspal maka peternak akan lebih mudah mendapatkan sarana produksi yang dibutuhkan dalam usaha penggemukan sapi.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1.** Implementasi Kebijakan Program Penggemukan Sapi di Kelompok Tani Makmur Desa Karang Endah dapat di simpulkan dari aspek-aspek berikut ini:

- a. Komunikasi**

Pada komunikasi dapat dilihat pada indikator-indikator yang ada, sebagai berikut:

1. Transmisi

Penyampaian berjalan dengan baik, yaitu berupa sosialisasi pembinaan dan pelatihan mengenai uraian tugas dan tanggung jawab pelaksana program pada pengurus Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung kepada para anggota kelompok peternak.

2. Kejelasan

Pada indikator kejelasan sudah baik, Dinas Peternakan sebagai penyalur sekaligus penanggung jawab memberikan uraian tugas dan pengetahuan mengenai program penggemukan sapi dengan jelas berupa pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh pengurus dari Dinas Peternakan.

3. Konsistensi

Pada indikator konsistensi telah berjalan dengan baik, pemberian informasi mengenai program penggemukan sapi berupa pengawasan dan *monitoring* langsung secara rutin yang diberikan kepada anggota kelompok peternak telah berjalan konsisten.

b. Sumber Daya

Pada sumber daya dapat dilihat pada indikator. Indikator yang ada sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia (Staf)

Pada indikator sumber daya manusia (staf), Implementasi Program Penggemukan Sapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan peternak belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh para peternak sebagai pelaksana program penggemukan sapi ini dan juga kurangnya SDM yang dimiliki khususnya dibidang teknisi perbaikan alat kerja.

2. Informasi

Pada indikator informasi, implementasi program penggemukan sapi sudah baik dalam melaksanakan programnya. Informasi mengenai tugas-tugas dan fungsi para aparat pelaksana dan tentang koordinasi antara penanggung jawab program dan pelaksanaannya sudah berjalan baik, karena para kelompok peternak telah mengetahui akan program penggemukan sapi ini untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

3. Wewenang

Pada indikator wewenang, kewenangan pada pelaksanaan program penggemukan sapi berjalan dengan baik, terlihat dari kewenangan implementasi yaitu para pengurus dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dan para kelompok peternak sebagai pelaksana program melaksanakan kewenangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

4. Fasilitas

Pada indikator fasilitas, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sarana dan prasarana yaitu alat-alat yang digunakan dalam proses melaksanakan program penggemukan sapi belum terpenuhi dengan baik. Begitu juga terkait pendanaan dimana masih sering terjadi tidak tepat waktunya penerimaan dana.

c. Disposisi

Pada indikator disposisi, para pelaksana program selalu tanggap menangani situasi di lapangan. Dinas Peternakan Provinsi Lampung rutin melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ada.

d. Struktur Birokrasi

Pada aspek struktur birokrasi terdapat dua variabel yaitu SOP dan fragmentasi yang sudah berjalan dengan baik. SOP dan fragmentasi sudah tercantum pada buku pedoman pelaksanaan program penggemukan sapi serta seluruh pelaksana sudah mengerti uraian tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan.

2. Dalam pelaksanaan Implementasi Program Penggemukan Sapi tersebut masih terdapat hambatan-hambatan yaitu:
 - a. Keterlambatan pencairan dana dari pusat, dimana dana-dana yang seharusnya sudah dikirim ke rekening kelompok peternak untuk membeli pakan dan alat kerja seperti mesin pengolah pakan mengalami keterlambatan juga.
 - b. Tidak adanya teknisi khusus untuk memperbaiki alat kerja bila terjadi kerusakan alat kerja, sehingga hal ini dapat menghambat proses pengerjaan program.
 - c. Minimnya pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki para peternak dalam mengolah pakan ternak olahan.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti dapat berikan dalam Implementasi Program Penggemukan Sapi di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal sering keterlambatan waktu pencairan dana bantuan program ini seharusnya pemerintah pusat dapat lebih jeli melihat kelemahan ini. Anggaran yang memang sudah dianggarkan untuk program penggemukan sapi sebaiknya segera dicairkan dan dikirim ke rekening pihak penyalur agar tidak terjadi keterlambatan pencairan dana di kelompok-kelompok peternak.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya dibidang teknisi yang memperbaiki alat kerja bila terjadi kerusakan sebagai penunjang keberhasilan program, dengan memberikan pelatihan kepada salah satu anggota kelompok dibidang teknisi teknologi.

3. Tim dari Dinas Peternakan lebih ekstra lagi dan fokus dalam pemberian pembinaan serta pelatihan kepada anggota kelompok peternak, khususnya dalam bidang pengolahan pakan olahan supaya para peternak dapat mengolah pakan olahan secara mandiri untuk kedepannya dengan cara pemberian pelatihan secara rutin.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Dunn, Willam N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjahmada. Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. PT.Elex Media Komputindo. Jakarta
- Subarsono, AG, 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sugeng Y. Bambang. 2004. *Sapi Potong*. PT. Penebar Swadaya. Jakarta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitiab Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Alfabeta. Bandung.
- Sulistio, Eko Budi. 2013. *Kebijakan Publik (Public Policy)*, Buku Ajar Kebijakan Publik. Bandar Lampung. FISP Univeristas Lampung.
- Suryana, 2008. *Pengembangan Usaha Ternak Sapi Potong Berorientasi Agribisnis Dengan Pola Kemitraan*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan.
- Wahab, Solichin Wahab. 2008. *Pengantar Kebijakan Publik*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah. Malang
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.

Sumber lain:

Badan Pusat Statistik. 2011. Populasi Sapi di Indonesia

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2015. Pedoman Pelaksanaan Penguatan Pakan Sapi Penggemukan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. 2012. *Populasi Ternak Sapi di Lampung*. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Bandar Lampung

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014, bahwa dalam angka memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri perlu upaya pencapaian swasembada daging sapi dan diperlukan suatu program swasembada daging sapi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Sumber Website:

www.antaranews.com (diakses pada 18 Desember 2015)

www.disnakkeswan.lampungprov.go.id (diakses pada 17 November 2015)

www.ditjennak.pertanian.go.id (diakses pada 4 Januari 2016)

www.ilmuternak.com (diakses pada 20 November 2015).

www.lampost.com (diakses pada 22 November 2015)

www.lampung.bps.go.id (diakses pada 23 Mei 2016)